JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 8 No. 2, 2025, hal 431-442 ISSN 2746-3249

Kajian Deskriptif Dampak Kerusakan Lingkungan terhadap Rumah Tangga Miskin di Pekanbaru

Laras Diajeng Putri*, Vindy Viandra Deanda, Taryono
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
**laras.diajeng3194@student.unri.ac.id*

Abstract
The sustainability of a society's survival will always depend on its environment. The environment provides beneficial outcomes when managed well; without this management, damage will occur, impacting not only oneself but also the wider community. Pekanbaru has the potential to improve the welfare of its people, but in reality, there are still many poor households that cannot meet their basic needs. The results of this study prove that the Environmental Kuznets Curve (EKC) aligns with the actual conditions of Pekanbaru, and thru a descriptive qualitative analysis approach sourced from the BPS, DLHK, and KLHK institutions/agencies, it can provide explanations for current and future researchers to offer suggestions for government policies. This condition shows that land management in Pekanbaru still needs improvement, and disaster mitigation and post-disaster education must be provided to the community so that they are also aware of the importance of good environmental management, as it will have a negative impact on everyone, especially the income of poor households. Additionally, the government must also create appropriate policies to minimize environmental damage without having to compromise the economies of poor households.
Keywords: *Environment; Income of Poor Households; Environmental Management; Impact of Environmental Damage; Government Policies*

Abstrak
Keberlangsungan masyarakat dalam bertahan hidup akan selalu bergantungan dengan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup memberikan hasil yang menyejahterakan apabila pengelolaan dapat dijalankan dengan baik, tanpa pengelolaan ini maka akan menimbulkan kerusakan sehingga dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk masyarakat luas. Pekanbaru memiliki potensi yang bisa menyejahterakan rakyatnya, namun dalam kenyataannya masih banyak rumah tangga miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil dari kajian ini membuktikan bahwa *Enviromental Kuznets Curve* (EKC) sejalan dengan kondisi Pekanbaru yang sebenarnya, melalui pendekatan analisis kualitatif deskriptif bersumber dari lembaga/instansi BPS, DLHK dan KLHK dapat memberikan penjelasan bagi peneliti saat ini maupun peneliti selanjutnya untuk dapat memberikan saran terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan lahan yang ada di Pekanbaru masih harus diperbaiki dan upaya pra-bencana maupun pasca bencana harus diedukasi kepada masyarakat agar masyarakat juga sadar akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik dikarenakan akan berdampak buruk bagi seluruhnya terkhusus pendapatan rumah tangga miskin. Selain itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan yang tepat untuk meminimalkan kerusakan lingkungan tanpa harus ada *trade-off* dengan ekonomi rumah tangga miskin.
Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Pengelolaan Lingkungan; Dampak Kerusakan Lingkungan; Kebijakan-Kebijakan Pemerintah; Upaya Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Lingkungan dengan kualitas yang baik akan menghasilkan suatu individu maupun populasi yang berkualitas pula. Lingkungan akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup suatu entitas. Dalam lingkungan terdapat sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh entitas yang hidup didalamnya tanpa terkecuali.

Lingkungan hidup merupakan suatu ruang lingkup yang memberikan kita ruang untuk saling bergantungan satu sama lain antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Lingkungan hidup dapat memberikan kita kesejahteraan dan dapat pula memberikan kita bencana. Serangkaian tata kelola dan aturan yang harus kita penuhi untuk menjaga lingkungan hidup ini untuk dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tersebut memerlukan entitas yang cerdas untuk meningkatkan perekonomian (Sriyanti Sriyanti, 2023).

Lingkungan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Dengan tata Kelola yang baik maka hasil yang diharapkan akan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat yang berada dalam lingkungan itu sendiri. Di kota besar seperti Pekanbaru, peningkatan aktivitas ekonomi, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk akan memberikan tekanan yang besar terhadap daya dukung lingkungan.

Berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh BPS (2024), jumlah penduduk miskin di Pekanbaru mencapai 38.160 jiwa dengan persentasenya yaitu 3,15 % serta garis kemiskinan yang bernilai sebesar 749.521 per kapita per bulan. Di sisi lain, laporan DLHK (2024) menunjukkan bahwa volume sampah dan pencemaran air sungai siak terus meningkat setiap tahunnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masih belum berjalan sepenuhnya beriringan dengan pengelolaan lingkungan sehingga rentan terhadap pendapatan rumah tangga miskin yang bergantung dengan faktor lingkungannya. Beberapa penelitian terdahulu salah satunya yaitu dalam jurnal yang telah dipaparkan oleh (Ria Armayani dkk., 2022) telah meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan secara umum tetapi belum mengkaji secara spesifik terutama di wilayah Pekanbaru.

Perlu kelola yang baik untuk menjaga lingkungan hidup, sebagai contohnya: melestarikan sumber daya agar dapat digunakan sampai kapan pun. Tanpa kebijakan akan pembatasan penggunaan sumber daya maka suatu entitas akan bersikap tamak untuk menyenangkan dirinya sendiri dengan mengambil keuntungan dari yang telah tersedia tanpa memikirkan risiko yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam ini telah diatur dalam UU dimana pengeksploitasian sumber daya dibatasi dan pemanfaatannya harus sedemikian rupa untuk kebutuhan dan harus sejalan dengan konservasi pelestariannya pula demi menjaga agar tidak terjadi kelangkaan (Agustina & Latte, 2023).

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan kondisi lingkungan dan dampaknya terhadap rumah tangga miskin di Pekanbaru, berupa kerusakan-kerusakannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin serta kebijakan seperti apa yang efektif untuk dilakukan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memperkuat kajian sebelumnya dan memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah Pekanbaru untuk menyejahterakan rakyatnya.

PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian sebelumnya memaparkan bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak besar pada kondisi pendapatan masyarakat. Hubungan dalam aktivitas ekonomi dengan sumber daya yang digunakannya akan menimbulkan eksternalitas pada lingkungan tersebut dan akan memperburuk kondisi sosial maupun ekonomi. Walaupun begitu, tetap saja masyarakat bergantung pada lingkungan dan sumber daya yang menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Dalam jurnal penelitian yang dipaparkan oleh Ria

Armayani et al. (2022) menyebutkan bahwa *Enviromental Kuznets Curve* relavan dengan kondisi lingkungan sekitar dimana tahap awal dari pertumbuhan ekonomi yaitu ditandai dengan meningkatnya kerusakan lingkungan, jika pendapatan mulai meningkat maka masyarakat akan menuntut lingkungan yang kembali semula dari kerusakan yang terjadi.

Kemudian penelitian tersebut dikembangkan lagi oleh Wahyudi et al. (2025) bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih bergantung pada aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan justru akan membuat kondisi masyarakat miskin akan semakin parah. Dengan lingkungan yang tidak terkelola dengan baik maka akan menurunkan distribusi pendapatan dan daya beli dari masyarakat itu sendiri. Dari dua peneliti yang telah memaparkan hasil penelitiannya, mereka hanya membahas dampak kerusakan lingkungan terhadap pendapatan masyarakat secara umum saja dan dalam cakupan yang luas, pada artikel ini akan membahas dampak dalam cakupan khusus yaitu di Pekanbaru, dengan memaparkan kondisi kerusakan lingkungan di Pekanbaru dan dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan paradigma interpretatif, karena tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam hubungan antara kerusakan lingkungan dengan pendapatan rumah tangga miskin di Pekanbaru. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena fenomena yang dikaji secara kompleks dan konstektual, sehingga tidak dapat hanya diukur dengan angka, melainkan memerlukan interpretasi mendalam terhadap data dan makna sosial dibaliknya.

Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru terkait dengan jumlah penduduk, jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan status pekerjaan utama; laporan dari instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker); dan hasil penelitian dan jurnal ilmiah terdahulu. Pemilihan data didasarkan relevansi dan keterkinian (tahun 2022-2025) agar hasil analisis mencerminkan kondisi aktual.

Untuk menganalisis dampak, penelitian ini menggunakan 2 kelompok indikator utama, yaitu indikator kerusakan lingkungan yang mencakup tingkat pencemaran udara dan air, alih fungsi lahan, dan frekuensi bencana serta indikator dampak sosial-ekonomi meliputi perubahan pendapatan, akses terhadap sumber daya alam, dan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.

Data dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menafsirkan hubungan antara kerusakan lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat miskin. Guna memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen untuk memperoleh konsistensi dan akurasi.

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk mengeksplorasi konteks lokal secara mendalam, mengungkap hubungan kausalitas yang kompleks, serta kesesuaiannya dengan tujuan penelitian yang bersifat eksplanatori dan interpretatif berbasis data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lingkungan di Pekanbaru

Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau yang terletak pada 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara dengan ketinggian 5-50 meter di atas permukaan laut. Menurut Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003, Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 58 kelurahan/desa serta luas wilayah 632,26 km². Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru Tahun 2024, jumlah penduduk di Pekanbaru mencapai 1.167.599 jiwa, dengan kepadatan penduduk

yang lebih tinggi jika dibandingkan jumlah penduduk dari daerah lain di Riau. Pekanbaru berada di tengah-tengah provinsi memiliki posisi yang strategis sehingga menjadi pusat perekonomian Riau dan tujuan untuk urbanisasi.

Meskipun demikian, kepadatan penduduk ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan di Pekanbaru. Pekanbaru kerap kali menghadapi kualitas udara yang buruk terutama yang diakibatkan dari asap kebakaran hutan dan lahan di Riau (Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, 2025). Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat, namun juga dapat menurunkan produktivitas dan pendapatan, terutama pada penduduk dengan berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, kualitas udara memiliki implikasi terhadap rumah tangga miskin karna dapat mengurangi hari kerja mereka, serta menambahkan beban kesehatan. Fenomena ini menunjukkan pola yang dijelaskan dalam *Enviromental Kuznets Curve* (EKC) yang menjelaskan bahwa emisi pencemar dan dampak lingkungan akibat aktivitas manusia cenderung akan meningkat seiring dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang berada pada tingkat rendah dan emisi tersebut akan cenderung menurun setelah mencapai tingkat tertentu dari PDB per kapita (Anwar dkk., 2022).

Selain itu, kepadatan penduduk juga menyebabkan tingginya polusi udara di Pekanbaru yang berasal dari emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Pekanbaru belum diikuti dengan kesadaran dan kebijakan lingkungan yang memadai sehingga polusi terus meningkat. Menurut EKC, peristiwa ini merupakan fase di mana pertumbuhan ekonomi masih menekan lingkungan karena baik dari pemerintah maupun masyarakat yang masih memprioritaskan ekspansi ekonomi, bukan keberlanjutan.

Di sisi lain, Sungai Siak sebagai sungai utama di Pekanbaru juga mengalami pencemaran akibat limbah rumah tangga maupun industri yang berdampak pada masyarakat yang bergantung pada sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mata pencaharian. Ditemukan beberapa tipe mikroplastik yang berada di Sungai Siak yaitu, fiber, fragmen, film. Mikroplastik ini berasal dari masyarakat yang mencuci di Sungai Siak dengan menggunakan deterjen, sampah plastik padat seperti ember, pipa paralon, botol plastik, toples, dan sampah plastik tipis seperti kantong plastik (Tampubolon dkk., 2024). Masyarakat miskin yang masih mengandalkan air sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi kelompok yang paling terdampak karena kualitas air yang menurun mengakibatkan meningkatnya risiko kesehatan dan menambah beban ekonomi.

Pertumbuhan kota yang cepat juga menimbulkan alih fungsi lahan, mengurangi kawasan hijau dan memperluas lahan terbangun. Lahan terbangun ini dapat meliputi industri, lahan permukiman, perdagangan, jasa dan perkantoran (Rahmasari dkk., 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nizar dan Fardani (2023), luas lahan terbangun di Pekanbaru pada tahun 2022 tercatat sebesar 13.680,48 Ha. Selain itu, pesatnya perkembangan kota ini menimbulkan masalah lingkungan dan infrastruktur, misalnya seperti sistem drainase yang belum mumpuni sehingga masih terjadi banjir di kawasan permukiman padat terutama yang dihuni oleh rumah tangga miskin. Hal ini menunjukkan adanya korelasi langsung antara perubahan fungsi lahan dengan eskalasi risiko bencana. Kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah merupakan pihak yang paling rentan karena biasanya menempati wilayah dengan drainase yang buruk dan rendahnya perlindungan lingkungan.

Permasalahan lain yang muncul adalah volume sampah yang terus bertambah besar namun masih tidak terkelola dengan baik. Kelemahan sistem pengelolaan sampah ini berkontribusi pada pencemaran air dan tanah dan menimbulkan beban ganda pada masyarakat miskin. Mereka tidak hanya menjadi korban pencemaran, tetapi juga terlibat dalam aktivitas informal seperti pemulung atau pengangkut sampah yang memiliki risiko kesehatan tinggi serta pendapatan yang rendah. Hal ini memperjelas mekanisme dari EKC yang menyatakan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan (Wang dkk., 2024).

Kondisi-kondisi tersebut memperlihatkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang pesat, Pekanbaru masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga lingkungan. Dampak penurunan kualitas lingkungan paling dirasakan oleh penduduk miskin atau lapisan bawah. Hal ini dikarenakan mereka cenderung bermukim di daerah rawan banjir, berdekatan dengan sumber pencemaran, serta memiliki akses yang terbatas pada kesehatan serta infrastruktur dasar. Akibatnya, kelompok miskin lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan sekaligus semakin terdesak dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dengan mengacu pada *Enviromental Kuznets Curve* (EKC), situasi Pekanbaru saat ini masih menggambarkan fase awal dari pertumbuhan ekonomi yang masih menekan lingkungan. Namun, integrasi kebijakan ekonomi hijau dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan oleh pemerintah berpotensi untuk mengubah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan menjadi positif dalam jangka panjang.

Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin

Pekanbaru merupakan salah satu kota penyokong pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera yang terus mengalami perkembangan di berbagai sektor. Namun, permasalahan seperti kemiskinan masih tidak dapat luput dari pandangan mata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2023 tercatat sebanyak 37.670 jiwa (3,16%), sedangkan pada tahun 2024 terdapat sekitar 38.160 jiwa (3,15%). Meskipun jumlah penduduk miskin secara absolut meningkat, persentase kemiskinan justru menurun karena adanya pertambahan jumlah penduduk secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Pekanbaru lebih bersifat proporsional, bukan penurunan jumlah secara nyata.

Kenaikan garis kemiskinan dari Rp712.000 pada tahun 2023 menjadi Rp749.521 pada tahun 2024 juga mengindikasikan meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Pekanbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Rumah tangga miskin masih menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan keterbatasan akses ke pekerjaan yang lebih layak. Dengan demikian, penurunan tingkat kemiskinan di Pekanbaru perlu disikapi secara hati-hati, sebab belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata di semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1 dibawah ini, sebagian besar pekerja di Pekanbaru pada tahun 2023 dan 2024 berada di sektor buruh, karyawan, atau pegawai dengan total mencapai 249.574 orang. Namun, masih terdapat proporsi besar tenaga kerja yang berusaha sendiri, pekerja keluarga atau tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar, dan pekerja bebas. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja di sektor informal masih cukup besar dan hampir seimbang sektor formal. Kelompok ini umumnya memiliki pendapatan rendah dan tidak menentu, jam kerja yang tidak tetap, serta tidak memperoleh perlindungan sosial maupun jaminan kesehatan. Situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru belum bersifat inklusif sepenuhnya karena sebagian masyarakat belum memperoleh manfaat pembangunan secara merata. Pekerja informal tetap berada pada posisi yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan lingkungan karena pendapatan yang tidak stabil dan kurangnya akses pada kebutuhan atau fasilitas dasar yang di mana dijelaskan dalam EKC.

Berikut Tabel 1 yang menyajikan gambaran mengenai kemiskinan yang ada di Pekanbaru yang mencakup jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan status pekerjaan utama.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, dan Status Pekerjaan Utama di Kota Pekanbaru Tahun 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Status Pekerjaan Utama
2023	37.670	3,16%	712.000	• Buruh/Karyawan/Pegawai (253.017) • Berusaha sendiri (86.970) • Pekerja keluarga/tak dibayar (42.258) • Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar (40.403) • Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (21.830) • Pekerja Bebas (19.589)
2024	38.160	3,15%	749.521	• Buruh/Karyawan/Pegawai (249.574) • Berusaha sendiri (96.297) • Pekerja keluarga/tak dibayar (47.346) • Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar (43.887) • Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (32.945) • Pekerja bebas (16.785) • Buruh/Karyawan/Pegawai (249.574)

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2023 dan 2024

Penelitian nasional juga menunjukkan kecenderungan serupa. Menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 dan 2024, penduduk yang bekerja pada sektor informal masih lebih besar dibandingkan dengan sektor formal. Pada tahun 2023 mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di kegiatan informal yaitu sebesar 59,11% atau 82,67 juta orang, sedangkan pada tahun 2024 proporsinya sedikit menurun menjadi 57,95% atau sekitar 83,83 juta orang. Meskipun secara nasional sektor informal masih mendominasi, struktur ketenagakerjaan di Pekanbaru menunjukkan tren menuju formalitas yang tinggi, namun tetap menyisakan kerentanan sosial di kelompok pekerja informal yang berpenghasilan rendah.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi ini berkaitan langsung dengan tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu *No Poverty*. Walaupun tingkat kemiskinan di Pekanbaru relatif rendah, kelompok pekerja informal masih berisiko tinggi terhadap kemiskinan akibat keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pencapaian tujuan *No Poverty* perlu memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas pekerjaan, dan keberlanjutan lingkungan.

Dampak Kerusakan Lingkungan terhadap Mata Pencaharian dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin

Bentuk Kerusakan Lingkungan di Pekanbaru

Manusia tidak akan pernah bisa puas akan hal yang telah tersedia oleh sang pencipta. Manusia banyak melakukan perubahan atas apa yang sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan, perubahan ini tidak sepenuhnya memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak negatif ini mesti dikaji dan dievaluasi kembali agar tidak hanya digunakan untuk kepentingan sementara namun untuk jangka yang panjang.

Di Pekanbaru ini pengalihfungsian lahan sudah marak terjadi dari tahun ke tahun yang mengakibatkan dampak negatif pada saat terjadi hal-hal yang tidak terduga. Sebagai contoh, *Pertama*, banjir tahunan (karena drainase buruk & alih fungsi lahan). Curah hujan yang tinggi dengan pengalihfungsian lahan yang tidak memperkirakan efek samping dari kegiatan tersebut akan menjadikan bencana banjir yang tiap tahun harus terjadi, masyarakat Pekanbaru yang terkena dampak ini banyak kehilangan harta dan diharuskan mengungsi untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir tersebut (Siregar, 2025). Selain pengalihfungsian lahan adapun efek drainase yang tidak dikelola dengan baik dan pembangunan yang asal-asalan menjadikannya bencana bagi masyarakat Pekanbaru itu sendiri. Bangunan yang padat dan rapat, saluran air yang tidak dialirkan dengan baik, sampah dimana-mana, kesadaran masyarakat yang buruk menjadikannya malapetaka (Sari, 2025).

Kedua, pencemaran udara (asap industri, transportasi, kadang kebakaran lahan gambut). Bangunan yang padat merayap, banyaknya industri di pinggiran perkotaan dekat dengan permukiman masyarakat memiliki efek polusi yang meraja lela. Polusi ini memiliki tingkatan yang mesti diawasi oleh pemerintah agar tidak membahayakan masyarakatnya sendiri. Selain dari industri adapun dari transportasi yang dikendarai oleh banyak masyarakat, penggunaan transportasi yang tidak efisien memiliki efek terhadap polusi udara. Terkadang ada hal tak terduga berupa dari kebakaran lahan gambut yang menyebar di beberapa titik yang berawal dari niat untuk membuka lahan tetapi dengan cara instan ini sangat merugikan masyarakat. Banyak penyakit yang akan timbul dari polusi udara tersebut karena kimia dan partikel yang berbahaya.

Ketiga, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan/industri. Hal tersebut menjadi dampak negatif karena pengalihfungsian lahan ini mengubah tatanan ekosistem yang semula sudah sangat natural sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, namun karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih mengharuskan alih fungsi lahan dilakukan (Kehutanan, 2023). Alih fungsi lahan tidak salah untuk dilakukan, tetapi pada beberapa kasus yang terjadi menjadi mimpi buruk yang akan diterima oleh masyarakat. Hal tersebut akan menjadikan efek domino yang merugikan sektor-sektor lainnya, sehingga masyarakat memerlukan solusi dari ulah masyarakat itu sendiri beserta dengan bantuan kebijakan pemerintah untuk mendukung partisipasi masyarakat agar memudahkannya dalam melakukan aktivitas tanpa terkendala efek pengalihfungsian lahan tersebut (Elvarahma, 2024).

Dampak terhadap Pendapatan

Dampak dari yang telah ditemukan ketika terjadi kerusakan terhadap lingkungan yang membuat beberapa aspek mendapatkan efek samping tersendiri, bukan hanya pada sisi kesehatan namun sisi yang lainnya juga berdampak negatif. Sebagai implikasinya juga berdampak pada perekonomian, ketika terjadi kerusakan lingkungan banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan perekonomian. Hal ini yang tidak dilihat pada saat mengeksploitasi sumber daya.

Ketika sampah membludak dan terus menerus memberi efek negatif terhadap lingkungan menjadikannya sebagai faktor utama penyumbatan saluran air ataupun drainase yang dipenuhi sampah sehingga pemerintah perlu mengeluarkan biaya untuk perbaikan ketika terjadi banjir yang mana kualitas air akan menurun bahkan infrastrukturnya menjadi rusak karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab tersebut sehingga perekonomian pun ikut berdampak pada daya tarik akan wisata ataupun untuk keberlangsungan hidup rumah tangga pun ikut turun. Rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada lingkungan apalagi kualitas air bersih sangat dirugikan dan menurunkan pendapatannya (Ramadhansyah dkk., 2024).

Lahan gambut yang digundulkan dengan cara dibakar untuk perluasan lahan ini mempengaruhi ekosistem disekitarnya dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam dari lahan ini pun berdampak pada pendapatan perekonomiannya yang kian menurun, jika curah hujan naik dan pohon sawit tidak ada maka banjir pun akan muncul karena lahan

gambut dan pohon sawit ini bersifat menyimpan air sehingga lebih merugikan para petani sawit dan terindikasi gagal panen bahkan yang lebih parahnya akan terjadi banjir karna daya serap akan lahan gambut ini tidak lagi efektif untuk dilakukan karna pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara yang tidak efektif (Taryono dkk., 2023).

Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan yang banyak untuk pembangunan fisik sebagai akses layanan publik menciptakan polusi udara, industri-industri yang ada di pinggiran kota juga tak kalah menyumbangkan polusi udara dan kita sebagai pengguna transportasi juga turut berpartisipasi dalam kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disumbangkan di Kota Pekanbaru ini terindeks sedang, yang dimana membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah agar dapat memulihkan kota Pekanbaru. Dengan kondisi yang buruk tersebut, beberapa upaya yang digalakkan pemerintah dengan mengedukasi masyarakat dan para industri di sekitar Pekanbaru (Ratna Masni & Herniwanti, 2025). Akibat dari polusi udara ini menghambat mobilitas kita sebagai pekerja dan juga produksi di pabrik–pabrik industri pun akan turun, begitu juga dengan para pedagang kecil yang akan ikut terkena imbas dari polusi tersebut. Hal ini akan menurunkan pendapatan dan perekonomian di Pekanbaru.

Strategi/Upaya Penanggulangan Dampak Kerusakan Lingkungan terhadap Mata Pencaharian dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin

Kebijakan & Program Pemerintah

Kebijakan pemerintah sebagai upaya penanggulangan dampak pencemaran lingkungan dapat dipaparkan sebagai berikut sesuai dari analisis yang disampaikan (Erison dkk., 2023) bahwa terdapat 3 misi *Smart Enviroment* yaitu (1) sumber daya lingkungan berkualitas dan bermanfaat sehingga menciptakan kenyamanan bagi masyarakat; (2) perlindungan terhadap kualitas lingkungan dengan pantauan dari badan-badan yang berwenang untuk mengelola indikasi polusi ataupun kerusakan lingkungan; (3) *Green building*, *site building* yang menjadi dukunga system penunjang *green industry* dan *green energy*.

Terdapat beberapa program yang digerakkan oleh pemerintah melalui lembaga kemasyarakatan dalam mengelola lingkungan ini diantaranya yaitu (1) pembinaan sekolah adiwiyata mulai dari tahun 2012; (2) pendirian bank sampah yang mengelola sampah melalui pengumpulan limbah-limbah rumah tangga; (3) pembinaan program kampung iklim dengan menghemat penggunaan energi, menggalakkan transportasi hijau dan penghijauan kota Pekanbaru (Fajar & Rafi, 2023); (4) fasilitas kerjasama antara pengusaha pengolah sampah dengan bank-bank sampah di masyarakat; (5) perluasan akan pemasaran produk-produk daur ulang yang lebih memberikan dampak baik terhadap masyarakat; (6) program pemerintah dalam mengatasi rumah tangga miskin melalui program PKH yang diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam program dan memenuhi persyaratan sebagai penerima yang berhak dibantu dalam hal pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial (Fithaloka dkk., 2024); (7) program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yaitu program unggul yang mengelola lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, seperti Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) (DLH, n.d.).

Peran Masyarakat

Peran masyarakat juga tak kalah penting untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, karena masyarakat sangat dekat dan bergantung terhadap lingkungan sekitarnya untuk dapat meningkatkan produktivitas. Dimulai dari program edukasi melalui Pendidikan formal hingga edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui RT setempat. Keberhasilan dari pengelolaan lingkungan akan membuat masyarakat menjadi nyaman dan sejahtera hingga produktivitas meningkat sehingga pendapatan pun akan meningkat pula mengurangi rumah tangga miskin (Agus Widodo. Mohammad Solekhan, 2022).

Masyarakat perlu berusaha semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan hidupnya dengan jalin kerja sama melalui lembaga-lembaga yang tersedia dilingkungannya untuk

meningkatkan taraf hidup agar tidak terus berada pada garis kemiskinan (Milla dkk., 2023).

Masyarakat yang sudah berada pada perekonomian yang bagus dapat memberikan peluang kerja kepada masyarakat sekitarnya untuk dipekerjakan dan menaikkan taraf hidupnya. Masyarakat yang berkecimpung dalam industri kecil maupun industri menengah harus mampu paham terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangganya.

Peran Lembaga/LSM/Swasta

Suatu lembaga dapat menjadi wadah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama bagi Rumah Tangga Miskin, hal ini sangat menguntungkan bukan hanya sebagai *owner* ataupun pemilik badan namun dapat membantu pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.

Sebagai implikasi akan hal ini dapat disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) merupakan lembaga yang berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Badan ini memberikan simpan-pinjam bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha. Program ini juga diawasi oleh pemerintah setempat di Pekanbaru untuk memantau kinerja dari usaha tersebut apakah dapat dikelola dengan optimal dan maksimal atau tidak (Milla dkk., 2023).

Adaptasi Rumah Tangga Miskin

Masyarakat dalam lingkup rumah tangga miskin dapat memanfaatkan program bantuan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pembinaan UMKM. Program ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya dengan pengelolaan bantuan yang baik seperti untuk membuat usaha kecil-kecilan.

Selain itu masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan zaman dengan bermata pencaharian melalui media sosial, banyak sekali platform yang dapat mendukung masyarakat dalam garis perekonomian miskin ini untuk berkembang

Dengan koordinasi pemerintah, masyarakat dituntut untuk dapat berusaha. Program-program ini tidak semata–mata membuat masyarakat malas untuk bekerja dan meningkatkan pengangguran bahkan menurunkan perekonomian namun melalui program ini kita dituntut untuk dapat berinovasi dan memiliki ide yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup sehingga perekonomian pun kian naik (Rohimah, 2024).

PENUTUP

Kesimpulan

Kerusakan lingkungan di Pekanbaru, seperti pencemaran udara dan air, alih fungsi lahan, serta buruknya sistem drainase, terbukti berpengaruh langsung terhadap penurunan pendapatan dan meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga miskin. Kondisi ini jelas memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan (EKC), di mana kerusakan lingkungan memperburuk kesejahteraan masyarakat miskin, sementara keterbatasan ekonomi menghambat upaya pelestarian lingkungan. Lingkaran kausalitas ini hanya dapat diputus melalui penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan prinsip ekonomi hijau serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Tujuannya adalah agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Saran

Langkah strategis yang dapat diambil pemerintah Kota Pekanbaru adalah memperkuat regulasi lingkungan, terutama dalam mengendalikan alih fungsi lahan, mengelola limbah secara terpadu, dan mengawasi ketat industri serta transportasi penyumbang polusi. Selain itu, program ekonomi hijau seperti pelatihan UMKM ramah lingkungan dan pengolahan sampah menjadi sumber pendapatan baru harus dijalankan untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Secara teoritis, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur secara empiris hubungan antara degradasi lingkungan dan kesejahteraan ekonomi. Kajian mendatang juga disarankan meneliti mekanisme adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi tekanan lingkungan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

BIBLIOGRAPHY

Agustina, E. S., & Latte, J. (2023). Pengaruh Potensi Sumber Daya Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga*, 5(1), 12–23. https://doi.org/10.36658/ijan.5.1.100

Agus Widodo. Mohammad Solekhan, B. S. (2022). 1670-5646-1-Pb. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang, 07(01), 132–146.

Anwar, M. A., Zhang, Q., Asmi, F., Hussain, N., Plantinga, A., Zafar, M. W., & Sinha, A. (2022). Global perspectives on environmental Kuznets curve: A bibliometric review. *Gondwana Research*, 103, 135-145. doi: 10.1016/j.gr.2021.11.010

BPS. (2023). Garis Kemiskinan 2023. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIyIzI=/garis-kemiskinan.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

BPS. (2024). Garis Kemiskinan 2024. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIyIzI=/garis-kemiskinan.html. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2025.

BPS. (2023). Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin 2023. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIyIzI=/jumlah-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status--pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

BPS. (2023). Jumlah Penduduk Miskin 2023. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzIzI=/jumlah-penduduk-miskin.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

BPS. (2024). Jumlah Penduduk Miskin 2024. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzIzI=/jumlah-penduduk-miskin.html. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2025.

BPS. (2024). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2024. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa--di-kota-pekanbaru--2024.html?year=2024. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2025.

BPS. (2024). Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru 2024. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzE2IzI=/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-bekerja-menurut-status-pekerjaan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2025.

BPS. (2023). Persentase Penduduk Miskin 2023. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0IzI=/persentase-penduduk-miskin.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

BPS. (2024). Persentase Penduduk Miskin 2024. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0IzI=/persentase-penduduk-miskin.html. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2025.

DLH. (n.d.). Program. DLH KOTA PEKANBARU. https://dlhpekanbaru.org/program/.

Diakses pada tanggal 04 Oktober 2025.

Elvarahma. (2024). Kebijakan Publik Dalam Menangani Kualitas Udara Buruk Di Pekanbaru. *Kompasiana.* https://www.kompasiana.com/elvarahma5305/67611825ed641577c459a0b2/kebijakan-publik-dalam-menangani-kualitas-udara-buruk-di-pekanbaru. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2025.

Erison, Y., Sholikin, A., Surur, M., Mabruri, M. A., Rosyid, H., & Habibah, N. (2023). "Leadership and Smart Environment Policy" Studi Kasus Implementasi Smart Environment di Pekanbaru. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(03), 521–535. https://doi.org/10.52166/madani.v15i03.6270

Fajar, M. F. A., & Rafi, M. R. Y. (2023). Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim. *Jurnal Studia Administrasi*, 5(1), 10–31. https://doi.org/10.47995/jian.v5i1.84

Fithaloka, A. A., Bayzura, N., & Fajri, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh): Studi Kasus Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial …*, 8, 88–97. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1375%0Ahttps://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/1375/1078

Kehutanan, D. L. H. dan. (2023). Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah. 1–83.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2023. Jakarta, Indonesia: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. https://ppid.kemnaker.go.id/uploads/LKJ_KEMNAKER_2023.pdf. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024. Jakarta, Indonesia: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. https://ppid.kemnaker.go.id/uploads/laporan_kinerja_2024.pdf. Diakases pada tanggal 23 Oktober 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. (2025). Wamen LH Diaz Hendropriyono: Titik Api Kebakaran Hutan di Riau Seperti Ada Kesengajaan. https://www.kemenlh.go.id/news/detail/wamen-lh-diaz-hendropriyono-titik-api-kebakaran-hutan-di-riau-seperti-ada-kesengajaan. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2025.

Milla, M. A. P., Taryono, T., & Desweni, S. P. (2023). Peran Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) Dalam Mendukung Pembangunan Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Journal of Social and Policy Issues*, 4, 176–182. https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.225

Nizar, M. I., & Fardani, I. (2023, January). Perubahan Tutupan Lahan Terbangun di Kota Pekanbaru Tahun 2000-2022. *In Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning* (Vol. 3, No. 1, pp. 24-30).

Rahmasari, A. N., Prabawa, S. E., & Wijayanti, R. F. (2023). Identifikasi Perubahan Lahan Terbangun dan Non Terbangun Menggunakan Metode Enhanced Built-up and Berenecs Index (EBBI) di Kota Surabaya Wilayah Barat. *Jurnal Geodesi Undip*, 12(4), 425-434.

Ramadhansyah, D., Guspandri, D., & Aprilia Nanda Sari, S. (2024). Analisis Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2, 898–908. http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura

Ratna Masni, F., & Herniwanti, H. (2025). ANALISIS KEJADIAN INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA (ISPU) SEBAGAI INFORMASI MUTU UDARA DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Kesehatan Dan Pengelolaan Lingkungan*, 6(1), 01–11. https://doi.org/10.12928/jkpl.v6i1.12504

Ria Armayani, Reni, Hilma Kholilah Lubis, and Novita Sari. 2022. "Hubungan Antara

Ekonomi Dengan Lingkungan Hidup: Suatu Kajian Literatur." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1(2):175–82. doi: 10.54443/sinomika.v1i2.181.

Rohimah, S. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Oleh Dinas Sosial Di Kota Pekanbaru. http://repository.uin-suska.ac.id/80030/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/80030/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf

Sari, V. N. (2025). DPRD Desak Pemko Pekanbaru Bongkar Ruko yang Tutup Drainase. *Cakaplah*. https://www.cakaplah.com/berita/baca/127943/2025/09/23/dprd-desak-pemko-pekanbaru-bongkar-ruko-yang-tutup-drainase#sthash.TL5UtWZB.dpbs

Siregar, R. A. (2025). Banjir di Pekanbaru Rendam Ribuan Rumah, Warga Dievakuasi. *DetikSumut*. https://www.detik.com/sumut/berita/d-7811099/banjir-di-pekanbaru-rendam-ribuan-rumah-warga-dievakuasi

Sriyanti Sriyanti. (2023). Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 24–39. https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327

Tampubolon, A. J., Budijono, B., & Fauzi, M. (2024). Kandungan Mikroplastik Pada Kolom Air di Sungai Siak Provinsi Riau. *Jurnal Fisika Unand*, 13(2), 218-224.

Taryono, T., Sari, L., & Iyan, R. (2023). Pemetaan Potensi Sumberdaya Lahan Gambut Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Daya Saing*, 9(3), 719–727. https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i3.1534

Wahyudi, Setyo Tri, Nurul Badriyah, Rihana Sofie Nabella, Kartika Sari, and Amalia Rahmawati. 2025. "The Relationship between Poverty and Environmental Damage in Indonesia: A VECM Analysis." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 23(1):29–46. doi: 10.29259/jep.v23i1.23254.

Wang, Q., Wang, X., Li, R., & Jiang, X. (2024). Reinvestigating the environmental Kuznets curve (EKC) of carbon emissions and ecological footprint in 147 countries: a matter of trade protectionism. *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1), 1-17. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02639-9